

ANGGARAN MINIMAL KINERJA MAKSIMAL, MUNGKINKAH? (ANALISIS KINERJA MAKSIMAL DENGAN ANGGARAN MINIMAL)

OLEH: ANWAR, S.PdI, M.PdI

ABSTRAK

Sistem penganggaran yang tepat tentu akan mengubah tata kelola didalam pemerintahan termasuk juga bisa meningkatkan kinerja secara optimal. Adanya sistem penganggaran yang benar benar terukur akan membantu pemerintah untuk bisa mewujudkan pencapaian tujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitan yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian studi kepustakaan dimana peneliti berusaha mengumpulkan sumber sumber yang terkait dan membahasnya menjadi satu kesatuan.

Penerapan anggaran yang minimal dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. Dengan adanya penerapan penganggaran yang tepat sesuai prinsip pendekatan kinerja maka akan dihasilkan capaian yang lebih maksimal. Dengan begitu maka dapat dikatakan bahwa penerapan penganggaran yang minimal dapat dihasilkan kinerja yang maksimal saat dilakukan dengan tepat dan sesuai sasaran.

Keyword: Anggaran Minimal, Kinerja Maksimal

A. PENDAHULUAN

Pemerintah telah melakukan beragam upaya untuk dapat memaksimalkan kinerja dari pemerintahan dari waktu ke waktu. Salah satu yang sekarang ini diupayakan tentu adalah pada adanya sistem penganggaran yang berbasis pada kinerja. Sebelumnya pemerintah telah menerapkan sistem penganggaran secara tradisional, namun hasil yang diharapkan tidak maksimal. Inilah yang kemudian membuat pemerintah menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja yang pada dasarnya kini tersedia. Tentu jika dipahami lebih jauh lagi, maka dapat digambarkan bahwa sistem penganggaran secara tradisional sendiri lebih menekankan pada anggaran yang berbasis line item. Dimana penganggaran tahun sebelumnya dijadikan sebagai patokan dalam sistem penganggaran ditahun selanjutnya.

Sistem penganggaran secara tradisional dianggap tidak terlalu signifikan dalam meningkatkan kinerja dari setiap aparatur pemerintahan. Hal ini jelas terlihat bahwa dengan adanya sistem anggaran tradisional maka tidak akan ada perubahan pada kinerja di tahun yang akan datang. Padahal, anggaran sendiri menjadi sebuah pernyataan terkait dengan estimasi kinerja yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Lebih jelas lagi Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa anggaran sendiri merupakan sebuah pernyataan

mengenai estimasi kerja yang ingin dicapai dalam periode tertentu yang termuat didalam bentuk finansial. Dengan begitu maka dapat dikatakan bahwa anggaran sendiri merupakan bagian yang terpenting dalam sistem pemerintahan.

Anggaran sejatinya digunakan sebagai patokan untuk bisa mengukur estimasi kinerja yang ingin dicapai dalam sistem pemerintahan nantinya. Didalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 sudah jelas dibahas terkait dengan sistem keuangan Negara yang termuat didalam pasal 19 ayat (1) dan (2). Bunyi dari pasal tersebut diantaranya adalah dalam rangka untuk melakukan penyusunan RAPBD (Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah), serta juga SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku pengguna anggaran dalam menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dilakukan dengan adanya pendekatan berdasarkan pada prestasi yang akan dicapai nantinya. Dengan begitu maka penerapan anggaran berbasis kinerja nantinya akan dianggap lebih bisa mengoptimalkan penerapan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut.

Pada dasarnya dengan adanya Anggaran minimal nantinya para perangkat daerah akan benar benar menunjukkan kinerja secara maksimal. Ini tentunya berkaitan dengan bagaimana pengoptimalan anggaran yang minim sehingga jauh lebih tepat sasaran. Berbeda dengan adanya pemberlakuan sistem anggaran tradisional yang lebih mengacu pada kinerja yang sudah dijalankan di tahun sebelumnya. Dalam pelaksanaan anggaran berbasis kinerja ini setiap aparaturnya daerah dituntut untuk melakukan perencanaan kinerja dengan optimal. Sehingga sistem penganggaran akan mengikuti rencana kerja yang sudah dibuat tersebut tentunya.

Nanda & Darwani (2016) menjelaskan bahwa didalam penerapan sistem anggaran berbasis kinerja sendiri perlu adanya perencanaan strategis terlebih dahulu. Nantinya sistem perencanaan yang strategis akan disusun bersama dengan seluruh komponen pemerintahan yang ada. Dengan begitu maka pengoptimalan sistem kinerja pada pemerintahan daerah sendiri akan bisa tercapai dari adanya anggaran yang sudah ditetapkan. Karena dengan adanya minimal anggaran yang sudah disesuaikan dengan program kerja maka kinerja yang ditunjukkan akan jauh lebih maksimal nantinya. Sistem anggaran berbasis kinerja sendiri dianggap dapat mengukur kinerja dari keuangannya yang sudah digambarkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Dalam penerapan anggaran berbasis kinerja sendiri tekanan yang diberikan adalah pada prestasi kerja atau hasil yang didapatkan. Lebih lanjut Bastian (2006) menjelaskan bahwa anggaran berbasis kinerja sendiri merupakan sebuah sistem penganggaran yang pada dasarnya berorientasi pada output yang dihasilkan oleh organisasi dan ini sangat berkaitan erat dengan visi dan misi serta juga perencanaan strategis dari sebuah organisasi. Pada dasarnya sistem penganggaran sendiri mengaitkan langsung pada adanya output dan juga outcome yang pastinya ingin dicapai yang disertai dengan adanya penekanan pada efektivitas serta efisiensi dari anggaran yang sudah dialokasikan (Sulistio, 2010).

Pada dasarnya dengan adanya anggaran minimal dengan sistem penganggaran berbasis kinerja sendiri dianggap menjadi sebuah hal yang penting dilakukan. Karena

dengan adanya sistem penganggaran yang berbasis pada kinerja dapat secara efektif meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena beragam program kerja yang dijalankan didalam pemerintahan bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat. Pada dasarnya sistem penganggaran yang berbasis kinerja sendiri tidak hanya bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat saja, namun juga berkaitan dengan meningkatnya kualitas sistem pembangunan, dan juga memperbaiki tata keuangan pada pemerintahan dengan lebih baik.

Penerapan sistem penganggaran yang minimal dapat mewujudkan adanya kinerja yang maksimal dengan menerapkan prinsip governance yang dilakukan oleh pemerintah. Dimana adanya penerapan prinsip governance sendiri akan bisa membuat pemerintah bisa mereformasi sistem manajemen keuangan dengan lebih baik lagi. Pada dasarnya sistem keuangan yang sudah direformasi dilakukan guna mendapatkan adanya transparansi serta meningkatkan akuntabilitas sehingga terwujud pemerintahan yang amanah dan juga professional. Adanya penerapan sistem penganggaran yang berbasis kinerja pada dasarnya sangatlah penting untuk diterapkan saat ini. Sebab, dengan begitu maka akan tercipta kinerja yang maksimal dalam sistem penganggaran yang direncanakan tentunya.

Nanda & Darwani (2016) didalam penelitiannya menyebutkan bahwa ada beberapa kendala yang dapat berpengaruh pada sistem penganggaran berbasis pada kinerja. Salah satu hal yang sangat berpengaruh pada sistem penganggaran berbasis kinerja sendiri adalah pada sumber daya manusia yang ada didalamnya. Dimana terkadang rencana kerja pemerintah daerah tidak sesuai dengan pelaksanaan yang harusnya dilakukan. Ini menjadi salah satu masalah yang harus segera ditangani agar tercapai tujuan dari pemberlakuan sistem penganggaran yang berbasis pada kinerja. Karena pada dasarnya sistem penganggaran berbasis kinerja sendiri menjadi sebuah pendekatan yang penting dalam penyusunan SKPD itu sendiri.

Penting dipahami bahwa dalam perencanaan pembuatan SKPD sendiri perlu untuk menitikberatkan kinerja didalamnya. Indikator kinerja menjadi sebuah hal yang sangat penting untuk bisa termuat didalam pembuatan SKPD. Melihat pada beberapa Negara lain yang sudah berhasil menerapkan sistem penganggaran berbasis kinerja seperti misalnya Australia. Negara ini dapat dijadikan sebagai sebuah contoh dalam penerapan sistem anggaran berbasis kinerja yang bisa diterapkan di Indonesia. Adanya perencanaan program kerja dengan baik tentu akan memaksimalkan kinerja yang ditunjukkan oleh aparatur pemerintahan. Sehingga tidak ada yang namanya dana tidak diserap karena setiap anggaran akan disesuaikan dengan kinerja yang ditunjukkan.

Dari uraian diatas maka peneliti ingin mengetahui lebih lanjut apakah bisa dengan sistem anggaran yang minimal bisa menghasilkan kinerja yang maksimal. Dengan adanya pembahasan yang diberikan nantinya akan didapatkan beberapa manfaat dari penelitian ini. Manfaat pertama, para pembaca nantinya akan lebih paham mengenai sistem anggaran yang lebih baik dengan mengedepankan kinerja didalamnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada dasarnya merupakan sebuah penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan adalah sebuah metode penelitian dengan cara mengumpulkan beragam teori yang relevan dengan penelitian yang dibahas. Masalah masalah penelitian tentunya bersifat universal dan dapat diselesaikan dengan tinjauan kepustakaan yang dilakukan oleh peneliti. Masalah yang dijadikan sebagai objek dalam penelitian ini adalah “Analisis Anggaran Minimal Mewujudkan Kinerja Maksimal”.

Sugiyono (2010) menyatakan bahwa studi kepustakaan atau library research sendiri adalah sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen terkait. Dokumen yang dijadikan sebagai dasar dalam pembahasan masalah penelitian tentu dapat diambil melalui buku, jurnal, ataupun artikel yang membantu. Bahan bahan pustaka yang relevan tentunya akan membantu peneliti untuk dapat menggambarkan masalah penelitian dengan lebih jelas. Sumber sumber lainnya yang relevan tentunya dapat dijadikan sebagai bahan dalam membuat tulisan ilmiah ini.

Penelitian ini bersifat sistematis karena menggunakan metode pengumpulan data yang dilakukan secara runtun dan terarah. Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah mencari bahan bahan dari sumber data yang tersedia. Terdapat dua sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini dengan baik yaitu sumber primer dan juga sumber sekunder. Sumber sekunder sendiri merupakan pokok bahasan yang menjadi inti dari permasalahan yang dibahas didalam penelitian ini. Sedangkan, sumber sekunder sendiri adalah beragam informasi yang dapat membantu peneliti menguraikan permasalahan dengan baik. Artinya, sumber sekunder sendiri merupakan bahan bahan yang memiliki keterkaitan dengan data primer yang dibutuhkan oleh peneliti.

Teknik analisa data yang digunakan oleh peneliti adalah menguji kebenaran dari masalah yang dibahas dalam penelitian. Pengujian kebenaran dari permasalahan peneliti tentunya dapat dibuktikan dengan mengumpulkan beragam sumber data yang terkait. Sehingga peneliti akan lebih mudah dalam memberikan pemahaman kepada para pembaca mengenai pembahasan tentang “Analisis Anggaran Minimal Mewujudkan Kinerja Maksimal”. Pertama tentu peneliti akan menentukan desain penelitian dengan tepat, kemudian akan dilakukan pencarian data pokok atau bisa dikatakan sebagai data primer,

setelah itu akan dilakukan pencarian pengetahuan kontekstual yang menguatkan permasalahan dalam penelitian tentunya.

C. PEMBAHASAN

a. Anggaran

Bastian (2006) menyatakan bahwa pada dasarnya anggaran sendiri adalah sebuah rencana terkait dengan operasi keuangan yang mencakup adanya estimasi pengeluaran yang diusulkan, juga berkaitan dengan sumber pendapatan yang diharapkan untuk dapat membiayai kegiatan dalam periode tertentu. Halim (2007) menambahkan bahwa pada dasarnya anggaran sendiri merupakan sebuah elemen ataupun parameter dalam periode tertentu dalam bentuk kuantitatif yang biasanya dimuat untuk perencanaan selama 1 tahun.

Anggaran pada dasarnya memiliki fungsi penting dalam pencapaian harapan dari organisasi yang diinginkan. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa pada dasarnya anggaran sendiri merupakan sebuah estimasi kerja yang pastinya ingin dicapai dalam periode waktu tertentu dan biasanya dimuat dalam bentuk finansial. Adanya penyerapan anggaran yang baik tentunya akan membantu maksimalnya kinerja yang diberikan oleh para aparatur pemerintahan. Sehingga tujuan dan juga cita cita yang ingin dicapai bisa didapatkan secara optimal dengan adanya penganggaran yang tepat.

Dulunya, Indonesia menerapkan sistem penganggaran secara tradisional yang pastinya dalam penerapannya anggaran tahun sebelumnya dijadikan sebagai dasar. Sehingga dari tahun ke tahun cenderung tidak ada perubahan yang signifikan dalam peningkatan kualitas kinerja yang dapat dilihat. Ini menjadi sebuah kelemahan dari sistem penganggaran dalam sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Sehingga perlu adanya reformasi pada manajemen anggaran yang diberlakukan dalam tata kelola pemerintahan yang ada di Indonesia.

Kini Indonesia telah menerapkan adanya sistem penganggaran yang berbasis pada kinerja yang membuat anggaran tidak membengkak. Tentu dengan adanya prinsip anggaran berbasis kinerja yang diterapkan maka anggaran yang dibutuhkan bisa diminimalisir dengan baik. Sehingga kinerja yang ditunjukkan dalam tata kelola pemerintahan akan bisa lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Ini menjadi sebuah bagian penting yang pada dasarnya perlu untuk diterapkan agar tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan professional.

b. Kinerja

Kinerja sendiri pada dasarnya menjadi salah satu hal yang penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan juga maju. Kinerja sendiri menjadi bagian yang penting dalam upaya mencapai cita cita bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera tentunya. Berdasarkan pada PP No. 58 Tahun 2005 yang menjelaskan tentang pengelolaan keuangan maka kinerja dapat diartikan sebagai keluaran/ hasil dari adanya kegiatan ataupun program yang akan atau telah dicapai. Dimana ini berhubungan dengan adanya

penggunaan anggaran dengan kuantitas dan juga kualitas yang benar benar sudah terukur. Ini sejalan dengan pendapat Baati (2006) yang menjelaskan bahwa anggaran sendiri adalah sebuah gambaran terkait dengan pencapaian dari pelaksanaan dari suatu kegiatan ataupun program kerja atau kebijakan dalam upaya untuk mewujudkan sasaran, visi, misi dan tujuan dari organisasi.

Kinerja lebih lanjut disampaikan oleh Mahsun (2006) bahwa pada dasarnya hal tersebut adalah sebuah gambaran terkait dengan tingkat pelaksanaan suatu kegiatan/program kerja, kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, serta visi sekaligus misi dari sebuah organisasi. Pada dasarnya pengukuran dari sebuah kinerja sendiri merupakan sebuah proses penilaian atas kemajuan dari pekerjaan terhadap tujuan serta juga sasaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Ini juga berkaitan dengan informasi atas efisiensi dari penggunaan sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan suatu barang/jasa. Nantinya hasil dari kinerja itu sendiri dibandingkan dengan maksud dari tujuan kegiatan yang dilakukan.

Dari pemaparan diatas maka dapat digambarkan bahwa pada dasarnya kinerja sendiri merupakan sebuah hasil yang ditunjukkan berkaitan dengan perencanaan yang sudah dilakukan. Kinerja merupakan hasil akhir yang kemudian akan dibandingkan dengan maksud dan juga tujuan dari program kerja yang sudah dibuat. Adanya kinerja yang maksimal akan membantu optimalnya tata kelola pemerintahan yang harusnya dijalankan. Kinerja juga dapat dikatakan sebagai prestasi kerja yang sudah dicapai dalam melaksanakan sebuah kegiatan yang dilakukan tentunya.

c. Anggaran minimal kinerja maksimal

Didalam tata kelola pemerintahan sendiri pada dasarnya pengelolaan dan pengaturan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang lebih optimal. Tentu prinsip anggaran yang lebih minimal diterapkan dalam perencanaan kinerja sendiri akan membantu tercapainya peningkatan yang lebih baik. Adanya anggaran yang sesuai dengan kinerja yang ditunjukkan akan membantu terciptanya transparansi dalam sistem pengelolaan pemerintahan nantinya. Perlu dipahami bahwa pada dasarnya anggaran berbasis kinerja sendiri merupakan sebuah hal yang penting dalam sistem tata kelola pemerintahan.

Halim (2007) menjelaskan bahwa anggaran berbasis kinerja merupakan sebuah sistem penganggaran bagi manajemen dalam mengaitkan setiap pendanaan yang kemudian dituangkan dalam kegiatan berbentuk output ataupun outcome yang diharapkan. Anggaran berbasis kinerja merupakan sebuah bentuk reformasi dari manajemen keuangan Negara yang selama ini diberlakukan. Dengan adanya penerapan anggaran yang berbasis kinerja maka nantinya akan didapatkan kesempatan untuk menciptakan transparansi anggaran. Selain itu akan terbentuk pula sistem pemerintahan yang professional dengan adanya penerapan anggaran berbasis kinerja.

Halim (2007) menambahkan bahwa terdapat beberapa prinsip dasar dalam penerapan anggaran berbasis kinerja didalam pengelolaan pemerintahan. Pertama, berkaitan dengan

transparansi dan juga akuntabilitas anggaran dimana perlu disajikan informasi yang benar benar jelas terkait dengan tujuan, sasaran, dan juga manfaat dari kegiatan yang kemudian didapatkan oleh masyarakat dari sebuah program ataupun kegiatan yang sudah dianggarkan tersebut. Dalam hal ini masyarakat memiliki hak yang sama dengan pemerintah dalam mengetahui proses penganggaran itu sendiri. Hal ini penting karena menyangkut pada aspirasi dan juga kepentingan dari masyarakat, terutama yang kaitannya dengan kebutuhan hidup dari masyarakat itu sendiri.

Kedua, disiplin anggaran pada dasarnya menjadi prinsip dasar yang juga tidak kalah penting dalam sistem penganggaran berbasis kinerja. Dalam hal ini pendapatan yang telah direncanakan pada dasarnya merupakan sebuah perkiraan yang terukur secara masuk akal yang nantinya dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan yang diperoleh. Sedangkan, pada belanja sendiri dianggarkan pada setiap pos anggaran yang merupakan batasan tertinggi dari sebuah pengeluaran belanja daerah. Nantinya penggunaan dana yang ada pada setiap pos tersebut perlu disesuaikan dengan beragam kegiatan yang sudah direncanakan tentunya.

Ketiga, keadilan anggaran sendiri juga menjadi bagian yang wajib dari prinsip dasar yang perlu diterapkan dalam sistem penganggaran yang berbasis kinerja. Dalam hal ini tentunya pemda wajib untuk mengalokasikan setiap penggunaan anggaran yang sudah ditetapkan dengan adil. Ini kemudian akan membantu tercapainya keadilan bagi masyarakat dimana anggaran yang diberikan dapat dinikmati oleh semua komponen masyarakat yang ada tanpa adanya diskriminasi.

Keempat, berkaitan dengan efektifitas dan efisiensi anggaran yang harus diberlakukan dalam penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja. Dimana penyusunan dari anggaran sendiri harus disesuaikan dengan azas efektivitas dan efisiensi dalam penganggaran yang dilakukan. Selain itu terdapat prinsip kelima yang penting yaitu pada pembuatan anggaran yang disusun dengan menggunakan pendekatan kinerja. Hal ini menuntut adanya penyusunan anggaran yang perlu dilakukan dengan adanya pendekatan kinerja yang berorientasi pada pencapaian dari hasil kerja melalui perencanaan alokasi biaya yang pastinya sudah ditetapkan.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya penerapan anggaran yang minimal dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. Dengan adanya penerapan penganggaran yang tepat sesuai prinsip pendekatan kinerja maka akan dihasilkan capaian yang lebih maksimal. Dengan begitu maka dapat dikatakan bahwa penerapan penganggaran yang minimal dapat dihasilkan kinerja yang maksimal jika dilakukan dengan tepat dan sesuai sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. (2006). *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. (2007). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPPN.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Bidang Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistio, Eko Budi. (2010). *Proses Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Way*. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan* Vol. 1 No. 1